

SKRIPSI

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT NELAYAN DI DAERAH PESISIR

(Studi Kasus Di Desa Sangiang, Kecamatan Wera,

Kabupaten Bima)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penulisan skripsi
pada Program Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH:

GILANG ARDANI
217110009

JURUSAN URUSAN PUBLIK

KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM 2023

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI
DAERAH PESISIR**

**(Studi kasus di Desa Sangiang Kecamatan Wera
Kabupaten Bima)**

Oleh:

GILANG ARDANI

Untuk memenuhi ujian Skripsi
Pada tanggal : 11 Januari 2023

Menyetujui;

Pembimbing

Pembimbing I

Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP
NIDN. 0822048901

Pembimbing II

Iwin Ardyawin, S.Sos.,M.A
NIDN. 0818059002

Mengetahui;

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN. 0822048901

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NELAYAN DI DEARAH PESISIR
(Studi Kasus Di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima)**


Oleh:

GILANG ARDANI
NIM.217110009

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji
Pada Tanggal 11 Januari 2023
Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan

Tim Penguji:

(Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP)
NIDN. 0822048901


()
Ketua



Iwin Ardyawin, S.Sos, M.A
NIDN. 0818059002


()
Anggota 1

Dr.H. Palahuddin, M.Ag
NIDN. 0031127316


()
Anggota 2

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



F/Dr.H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : GILANG ARDANI

NIM : 217110009

Memang benar bahwa skripsi yang berjudul: “**Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Daerah Pesisir (Studi Kasus Di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima)**” merupakan karya sendiri dan belum ada yang mengajukan untuk mendapatkan gelar Akademik ditempat manapun.

Skripsi ini merupakan murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun, kecuali arahan dari pembimbing. Jika memiliki karya atau pendapat dari orang lain yang telah dipublikasikan, maka itu diacu sebagai sumber dan dicantumkan kedalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 30 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan



GILANG ARDANI
NIM. 217110009



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GILANG ARDANI
NIM : 217110009
Tempat/Tgl Lahir : TAPEWA 31 DESEMBER 1997
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 082236543026
Email : gilangardani97@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDATAAN
MASYARAKAT NELAYAN DI DAERAH PESISIR (studi kasus di desa
sanglang Kecamatan Wera Kabupaten)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 478

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 25 JANUARI 2023
Penulis



GILANG ARDANI
NIM. 217110009

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GILANG ARDANI
 NIM : 217110009
 Tempat/Tgl Lahir : TADEWA 31 DESEMBER 1997
 Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
 Fakultas : FISIPOL
 No. Hp/Email : 082 236 543 026 / gkangardani97@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDATAAN
MASTABAKAT NELAYAN DI DAERAH PESISIR (STUDI KASUS
di desa sanglang Kecamatan Wera Kabupaten Bima)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 25 JANUARI 2023
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



GILANG ARDANI
 NIM. 217110009



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

Buat apa memiliki pedoman kalau masih pedoman sekedar formalitas.

Yakin adalah kunci dari Kesuksesan



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobil alamin, atas rahmat dan hidayahnya ALLAH SWT yang telah meridhoi saya dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Untuk orang tua saya tercinta bapak dan ibu saya ucapkan terimakasih banyak atas doa-NYA, cintanya, kasih-sayangannya, dukungannya, motivasinya, serta semangat yang tiada henti kalian berikan.
2. Untuk keluarga saya tercinta terimakasih atas motivasi dan dorongan yang sudah diberikan.
3. Untuk teman-teman dan sahabat-sahabatku yang tidak ku sebut namanya satu-persatu terimakasih atas dukungan dan dorongan yang sudah kalian berikan.
4. Para dosen dan staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu membimbing, mendidik dan mengajarkan. Terimakasih untuk jasa-jasa yang tidak mampu terbalaskan.
5. Kampus Hijau dan Almamater kebanggaanku Universitas Muhammadiyah Mataram.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Daerah Pesisir (*Studi Kasus Di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima*)”** dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Salawat dan salam atas junjungan Rasulullah SAW. Keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT sebagai uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun dengan ketabahan dan kekuatan yang disertai dengan do'a, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Abdullah dan ibunda Armah yang senantiasa memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi putranya, telah mengasuh dan mendidik dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya do'a yang dapat penulis berikan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang Allah SWT.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak Drs Abdul Wahab, MA yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.si terima kasih atas dedikasi yang tinggi terhadap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP selaku ketua program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP selaku pembimbing I dan Bapak Iwin Adryawin, S.Sos., M.A selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini..
5. Para Bapak/Ibu dosen dan staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang sejak awal perkuliahan telah membimbing dan memberi pengetahuan kepada penulis, khususnya dalam bidang Administrasi Publik.
6. Kepala perpustakaan dan segenap karyawan Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku

dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.

7. Kepada saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu karena telah banyak memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. *Teman-teman KKN Angkatan XXIV Tahun 2020*, terutama posko Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan, Andri Gunawan, dan jaidin yang bersedia membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini.

Teriring do'a semoga amal dan kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya, Aamiin.

Mataram, 26 Desember 2022

Peneliti

GILANG ARDANI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NELAYAN DI DAERAH PESISIR**
(Studi Kasus Di Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima)

GILANG ARDANI
217110009

ABSTRAK

Kabupaten Bima merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah pesisir Indonesia tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang secara geografis adalah daerah pesisir. Banyak daerah pesisir, salah satunya Desa Sangiang. Desa Sangiang merupakan sebuah Desa dengan kepadatan penduduk yang tidak terlalu padat yang berada disebelah utara Kecamatan Wera. Aktifitas masyarakat yang tinggal di Desa Sangiang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan merupakan mata pencarian mereka sehari-hari. Dilihat dari tradisi masyarakat nelayan aktivitasnya sama dengan nelayan pada umumnya, mereka menangkap dan mengumpulkan hasil laut seperti ikan, udang, cumi, tiram dan sebagainya. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan dan kelautan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di daerah pesisir dan untuk mengetahui dampak kebijakan pemberdayaan pemerintah daerah oleh dinas perikanan dan kelautan terhadap ekonomi masyarakat nelayan di Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

Dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah kerja penelitian kualitatif yakni tidak menggunakan alat-alat pengukur. Data atau informasi yang diperoleh, dideskripsikan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, baik berupa kata-kata ungkapan atau tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian di Desa Sangiang dan Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Bima. Waktu pelaksanaan penelitian skripsi bulan Oktober 2022. Sumber data yang dihasilkan, data primer merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Teknik analisa data yang dilakukan peneliti menggunakan analisis kualitatif yang digunakan peneliti berguna sebagai alat untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data yang didapat dari observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan responden dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana kebijakan pemerintah daerah (Dinas Perikanan dan Kelautan) dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, dan bagaimana hubungan pemerintah daerah (Dinas Perikanan dan Kelautan) dengan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

Peran pemerintah dapat dikategorisasi menjadi lima upaya yaitu pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta kelembagaan masyarakat nelayan. Pemerintah daerah masih kesulitan dalam memfasilitasi, pelatihan, pendidikan, penyuluhan, dan pendampingan bagi masyarakat nelayan karena masih terkendala dengan penyesuaian waktu sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi kegiatan, Nelayan masih sulit mendapatkan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, khususnya yang berkaitan dengan harga komoditi dipasaran dan penggunaan alat tangkap modern. Selain itu kemitraan usaha dan dukungan kelembagaan bagi Masyarakat Nelayan masih lemah ditandai dengan kecenderungan Masyarakat Nelayan bergantung pada tengkulak khususnya dalam permodalan. Oleh sebab itu, berdaya atau tidaknya nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan pemilik, tergantung sejauh mana Masyarakat Nelayan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Pemerintah dan lingkungannya sehingga kemandirian berkelanjutan dapat tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Bima meliputi faktor pendukung yaitu kuantitas sumber daya manusia, kebijakan pemerintah, bantuan modal usaha dan ketersediaan sarana dan prasarana dan faktor penghambat berupa kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan regulasi, dan ketergantungan dengan pemilik modal.

Kata kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Daerah Pesisir, Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

**LOCAL GOVERNMENT POLICIES IN EMPOWERING FISHERMAN
COMMUNITIES IN COASTAL AREAS**
(Case Study in Sangiang Village, Wera District, Bima District)

GILANG ARDANI
217110009

ABSTRACT

The Province of West Nusa Tenggara (NTB), which is geographically a coastal area, is where the Bima Regency is one of the regencies in Indonesia's coastal region. Sangiang Village is one of the numerous coastal communities. Sangiang Village, located to the north of Wera District, has a moderate population density the activities carried out by residents of Sangiang Village. The majority of the population makes their living as fishermen. They engage in similar activities to the fisherman. Fish, shrimp, squid, oysters, and other marine goods are caught and collected by them. To learn more about the local Government's policies for empowering fishing communities in coastal areas through the fisheries and marine services, as well as the effects of those policies on the economy of fishing communities in Sangiang Village, Wera District, and Bima Regency.

This study employed qualitative research methods, avoiding the use of measurement instruments. The data or information gathered is reported following the field's reality and presented in words or sentences, either orally or in writing, from the individuals and the behaviours seen. The Department of Fisheries and Maritime Affairs of the Bima Regency and Sangiang Village will be the study locations for the author's thesis. The thesis research must be completed by October 2022. Data from primary data sources, or the initial source in the field, make up the definitive data source, called primary data. To describe how local government policies (Fisheries and Maritime Services) in empowering fishing communities in the villages of Sangiang, Wera District, and Bima Regency, and how is the relationship between the local Government (Fisheries and Maritime Services), data analysis techniques that are carried out by researchers using qualitative analysis are useful as a tool for interpreting and interpreting data obtained from observation, documentation, and interviews with respondents.

The five efforts that make up the Government's role include institutions in fishing communities, education and training, counselling and mentorship, corporate partnerships, and easy access to knowledge, technology, and information. Local governments still struggle to offer training, education, outreach, and assistance to fishing communities because of persistent time constraints that affect the effort involved with contemporary fishing gear. In addition, business partnerships and institutional support for the Fishermen's Community are still weak, marked by the tendency of the Fishermen's Community to depend on middlemen, especially in terms of capital. Therefore, the degree to which the Fishermen Community uses the chances

provided by the Government and their surroundings to attain sustainable independence determines whether small fishermen, traditional fishermen, labour fishermen, and owner fishermen are empowered. Supportive factors, such as the number of human resources, government policies, business capital assistance, and the accessibility of facilities and infrastructure, as well as inhibiting factors, such as human resource capacity, budgetary restraints, regulatory restrictions, and reliance on owner capital, affect the empowerment of fishing communities in the Bima Regency.

Keywords: *Local Government Policy, Empowerment of Fishermen Communities in Coastal Areas, Sangiang Village, Wera District, Bima Regency.*



DAFTAR ISI

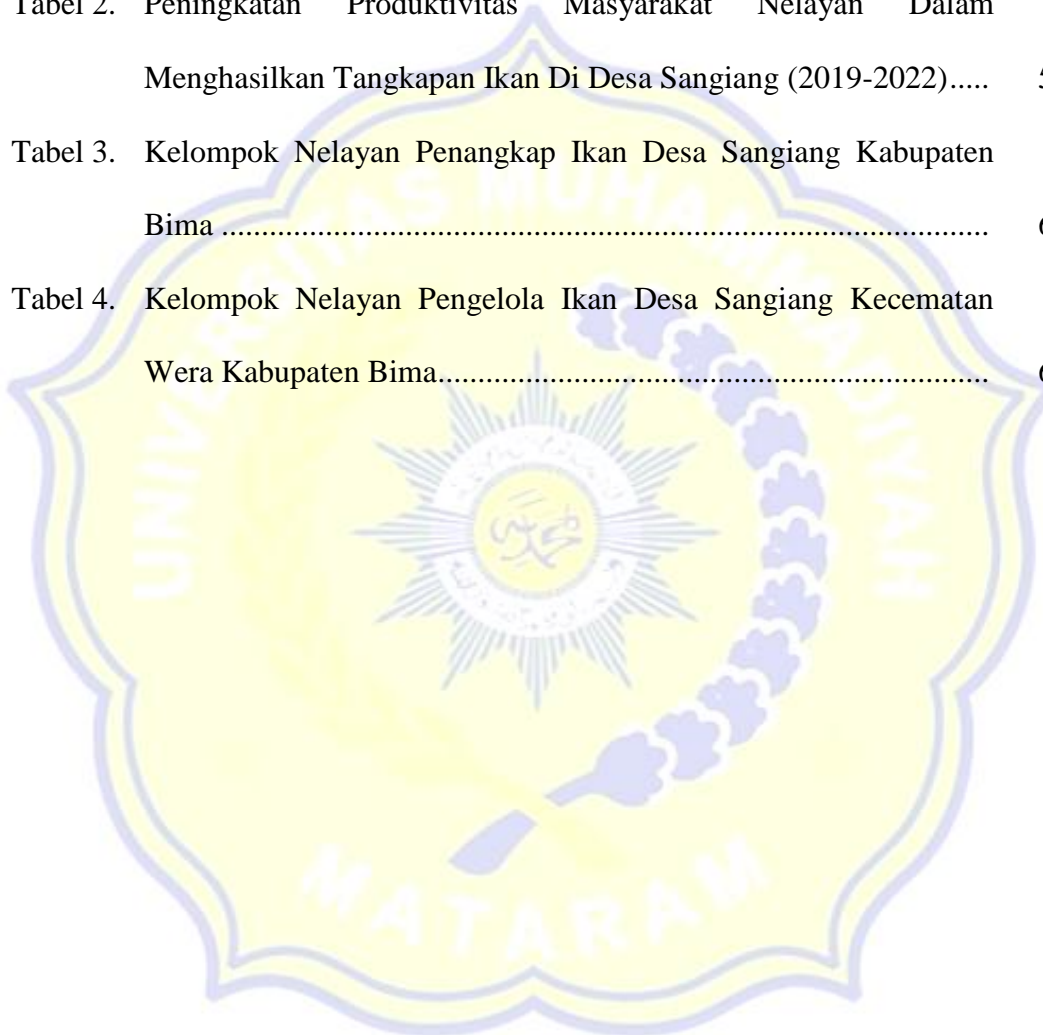
| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME | v |
| SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| ABSTRAK | xii |
| ABSTRACT | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 8 |
| 2.2 Landasan Teori..... | 9 |
| 2.2.1 Kebijakan | 9 |

| | |
|--|-----------|
| 2.2.2 Pemerintah Daerah..... | 10 |
| 2.2.3 Pemberdayaan | 10 |
| 2.2.4 Macam-Macam Pemberdayaan..... | 12 |
| 2.2.5 Strategi Pemberdayaan..... | 14 |
| 2.2.6 Konsep Strategi Pemberdayaan Nelayan | 15 |
| 2.2.7 Masyarakat Nelayan..... | 17 |
| 2.2.8 Kerangka Berpikir..... | 17 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 20 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 20 |
| 3.2 Tempat dan Waktu | 20 |
| 3.3 Informan Penelitian..... | 20 |
| 3.4 Sumber Data..... | 21 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 22 |
| 3.6 Teknik Analisis Data..... | 23 |
| 3.7 Keabsahan Data | 25 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 29 |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 29 |
| 4.1.1 Profil Umum Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bima | 29 |
| 4.1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan | 31 |
| 4.1.3 Letak Geografis Desa Sangiang | 38 |
| 4.1.4 Profil Pemerintahan Desa Sangiang..... | 38 |

| | |
|---|-----------|
| 4.1.5 Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Sangiang..... | 44 |
| 4.1.6 Pemberdayaan Masyarakat Nelayan | 53 |
| 4.1.7 Peningkatan Produktivitas Masyarakat Nelayan..... | 54 |
| 4.1.8 Pembentukan Kelompok Nelayan..... | 60 |
| 4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Bima | 63 |
| 4.2.1 Faktor Pendukung | 63 |
| 4.2.2 Faktor Penghambat..... | 69 |
| BAB V PENUTUP..... | 78 |
| 5.1 Kesimpulan | 78 |
| 5.2 Saran | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Penelitian terdahulu..... | 8 |
| Tabel 2. Peningkatan Produktivitas Masyarakat Nelayan Dalam Menghasilkan Tangkapan Ikan Di Desa Sangiang (2019-2022)..... | 55 |
| Tabel 3. Kelompok Nelayan Penangkap Ikan Desa Sangiang Kabupaten Bima | 61 |
| Tabel 4. Kelompok Nelayan Pengelola Ikan Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima..... | 62 |



BAB I

PENDAHULIAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki potensi sumber daya laut dan pantai yang sangat besar, kekayaan alam Indonesia tersebut dibuktikan dengan berbagai ragam sumber daya hayati pesisir yang bervariasi seperti terumbu karang, rumput laut, hutan mangrove, ikan yang berlimpah serta sumber daya yang tidak dapat diperbarui misalnya minyak bumi dan bahan tambang lainnya (Memah, M. Y. *et al*, 2022).

Dengan melihat kondisi sumber daya alam dan hasil laut yang melimpah seharusnya masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Indonesia sudah hidup sejahtera dan berkecukupan, namun sayangnya hal itu belum bisa diwujudkan oleh pemerintah Republik Indonesia karena masih banyaknya masyarakat nelayan yang hidup dibawah garis kemiskinan dan masih sangat jauh dari taraf kesejahteraan. Saat ini masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir hidup dalam keadaan/kondisi yang kurang baik terlihat dari keadaan lingkungan dan tempat tinggal/rumah, secara visual dan jauh dari kata rumah layak huni, banyaknya anak-anak yang putus sekolah yang menyebabkan masyarakat pesisir menjadi miskin, peristiwa ini terjadi karena pola kekuasaan yang sangat sentralistik sehingga masyarakat yang tinggal di daerah pesisir kurang dan bahkan tidak mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah (Raja, I. N. 2019).

Sebenarnya pada masa reformasi ini sudah terbuka lebar untuk pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan dibandingkan dengan masa-masa yang sebelumnya, karena pada masa yang sekarang ini pembangunan sudah berbasis otonomi dan pemerintah pusat seharusnya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah (PEMDA) untuk membuat program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu kebijakan pemerintah daerah adalah dengan mengadakan program-program intervensi pembangunan, seperti Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Pemberdayaan masyarakat nelayan sangat diperlukan, dan kemandirian masyarakat itu diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar mereka dalam pembangunan kawasan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan. Sehingga diharapkan program pemberdayaan bisa mendorong mobilitas masyarakat nelayan untuk berkembang (Yamin, M. 2022).

Tujuan pemberdayaan masyarakat sudah tertera didalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik Seperti juga masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi

sejumlah masalah politik, social dan ekonomi yang lebih kompleks. Dari undang-undang diatas menegaskan bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam memantau secara berkala, kualitas lingkungan pesisir, baik wilayah darat laut dan pantai maupun di tempat masyarakat melakukan aktivitas budaya, dengan demikian pemerintah punya data dasar untuk mengetahui perkembangan masyarakat pesisir (Nurfitriyani, N. 2022).

Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai Indonesia dikenal sebagai kawasan masyarakat miskin, kumuh dan terbelakang. Kondisi ini sangat ironis apabila dibandingkan dengan keadaan alam wilayah pesisir Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam dan potensial dikembangkan secara ekonomi. Adapun kemiskinan bagi nelayan dalam beberapa hal dapat dibenarkan dengan beberapa fakta seperti kondisi pemukiman yang kumuh, tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah, rentannya mereka terhadap perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang melanda, dan ketidakberdayaan mereka terhadap intervensi pemodal, dan penguasa yang datang. Masyarakat nelayan memiliki sistem ekonomi, sosial budaya yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Dan dilihat dari dimensi ekonomi misalnya, penghasilan yang tidak menentu tiap harinya, biaya produksi yang semakin mahal, dan dilihat dari dimensi sosial budaya misalnya sumber daya manusia yang rendah, tetapi masyarakat nelayan memiliki etos kerja yang tinggi dan rasa solidaritas yang tinggi. Karena jumlah masyarakat pesisir yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin meningkat, hal ini perlu diatasi oleh

pemerintah dan perlu juga adanya analisis kebijakan yang optimal dari pemerintah dalam mengatasi masalah ini (Widjajanti, W. W. 2019).

Kabupaten Bima merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah pesisir Indonesia tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang secara geografis adalah daerah pesisir. Banyak daerah pesisir, salah satunya Desa Sangiang. Desa Sangiang merupakan sebuah Desa dengan kepadatan penduduk yang tidak terlalu padat yang berada disebelah utara Kecamatan Wera. Aktifitas masyarakat yang tinggal di Desa Sangiang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan merupakan mata pencarian mereka sehari-hari. Dilihat dari tradisi masyarakat nelayan aktivitasnya sama dengan nelayan pada umumnya, mereka menangkap dan mengumpulkan hasil laut seperti ikan, udang, cumi, tiram dan sebagainya.

Meskipun dari kegiatan melaut adakalanya memberikan hasil yang sangat melimpah, namun tak jarang pula dan bahkan seringkali hasilnya hanya bisa menutupi kebutuhan dalam sehari saja. Sehingga perlu adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti yang tertulis dalam peraturan daerah kabupaten Bima yakni pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat nelayan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang pemberdayaan masyarakat nelayan. Sehingga aturan yang ada kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat nelayan. Agar upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat nelayan mencapai sasaran yang maksimal maka diperlukan pengaturan yang lebih spesifik di tingkat daerah dalam bentuk

produk hukum seperti peraturan daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat nelayan. Melihat kondisi masyarakat Desa Sangiang yang merupakan sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan perlu adanya kebijakan dari pemerintah kabupaten Bima untuk lebih memperhatikan nasib mereka. Sudah menjadi keharusan bagi pemerintah Kabupaten Bima untuk mengupayakan solusi, melalui program-program seperti pemberdayaan masyarakat. Dengan keterbatasan anggaran pembangunan, bagaimana nantinya pemerintah daerah mampu bersinergi dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat agar nantinya kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.

Dari gambaran kondisi masyarakat desa sangiang, daerah pesisir di daerah peneliti melakukan penelitian, maka dalam skripsi ini peneliti akan melakukan penelitian dengan judul ***Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Daerah Pesisir (Studi di Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima)***. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah (Dinas Perikanan dan Kelautan) kabupaten Bima untuk memberantas menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi di daerah pesisir melalui pemberdayaan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah:

- a. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di daerah pesisir di Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima?
- b. Bagaimana dampak kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bima terhadap perkembangan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan dan kelautan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di daerah pesisir di Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.
- b. Untuk mengetahui dampak kebijakan pemberdayaan pemerintah daerah oleh dinas perikanan dan kelautan terhadap ekonomi masyarakat nelayan di Desa Sangiang, kecamatan wera, kabupaten bima.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1.4.1 Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di daerah pesisir.
- b. Penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian yang sejenis pada waktu yang akan datang.

- c. Penelitian ini sebagai syarat dan tugas akhir untuk mendapatkan gelar strata satu (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
- d. Bagi peneliti lain dapat menjadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

1.4.2 Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi yang konstruktif guna dijadikan sebagai bahan masukan bagi seluruh masyarakat yang terdapat di wilayah pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan.
- b. Diharapkan dapat berguna bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan.
- c. Menjadi bahan pendidikan sosial dan budaya untuk pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di daerah pesisir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibawah ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian untuk memperkaya wawasan. Dari penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian ini.

Namun demikian, penulis menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitian ini.

Untuk memahami penelitian sebelumnya, penulis dapat menjelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian terduhulu

| No | Judul | Hasil | Perbedaan dan Persamaan |
|----|---|--|---|
| 1. | Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di desa Nagha 1 Kecamatan Tamako kabupaten kepulauan sangihe (2019) Glendy Hormati, Michael Mantiri dan Frans Singkoh. | Hasil penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pemerintah daerah, bahwa standar dan sasaran yang telah disusun yang belum terlaksana dalam upaya pembedayaan masyarakat nelayan di desa Nagha 1 Kecamatan Tamako, Kabupaten Sangihe. | Pemanfaatan kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Nagha Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sanghie digali dalam kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.. |
| 2. | Rekontruksi Sosial Ekonomi (Studi Bumdes Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Nelayan | Hasil penelitian dari penelitian ini pemanfaatan usaha BUMDES pada masyarakat nelayan | Kajian ini berbeda dengan kajian sebelumnya karena juga melihat rekonstruksi sosial ekonomi BUMDES dan pemberdayaan |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | Desa Sangiang Kabupaten Bima). (2018) Iirdansyah dan E Meiyani. | desa Sangiang tidak membuahkan hasil, dan nelayan tidak pernah menuai atau merasakan manfaat dari BUMDES itu sendiri. | masyarakat nelayan di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima. |
| 3. | Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur (2017) Dias Nilasari. | Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pemerintah daerah tidak menghasilkan pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, dan Kabupaten Luwu Timur. | Keterkaitan studi sebelumnya dengan studi ini adalah sama-sama fokus pada bagaimana pemerintah daerah di Desa Wewangriu, Distrik Malili, dan Distrik Wewangriu menganalisis dan mendukung masyarakat nelayan pesisir. |

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Kebijakan

Kebijakan adalah pernyataan atau dokumen tertulis yang menawarkan pedoman umum untuk menentukan rentang gerak yang menetapkan batasan dan memberikan arahan umum bagi seseorang untuk bergerak. Ditinjau dari segi etimologi kata, metode penerjemahan (kebijakan). Definisi lain dari kebijakan adalah seperangkat ide dan ajaran yang menentukan bagaimana pekerjaan dilakukan, bagaimana pemimpin memimpin, dan bagaimana orang berperilaku. Menurut kutipan dari Carl J. Federick dan Leo Agustino, kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang direkomendasikan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam situasi di mana ada kemungkinan dan hambatan untuk

memberlakukan kebijakan yang diusulkan. Karena kebijakan harus menunjukkan apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu subjek, pendapat ini juga menunjukkan pentingnya gagasan kebijakan yang melibatkan perilaku yang memiliki tujuan dan sasaran (Egeten, M. 2017).

2.2.2 Pemerintah Daerah

Kepala eksekutif daerah adalah pemerintah pusat. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat, disebut juga Pemerintah, Presiden Republik Indonesia yang mewakili pemerintahan negara disebut Pemerintah. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Pusat mewakili Indonesia. - Sesuai dengan asas dan sistem Negara-bangsa Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Tahun 1945, telah dilakukan pembaharuan Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mencerminkan pengakuan pemerintah daerah sebagai “penyelenggaraan” DPRD dan pemerintahan daerah (Iskandar, I. 2016).

2.2.3 Pemberdayaan

Kekuasaan dan gagasan lainnya terkait, dan pemberdayaan adalah konsep yang terkait dengan kekuasaan. Dengan mendorong, memotivasi, dan memperhatikan potensi masyarakat, pemberdayaan masyarakat secara langsung dapat dilihat sebagai proses membangun masyarakat dengan

membangun kapasitas masyarakat dan upaya membangun kekuatan tersebut (Adi, I.R. 2015).

Pemberdayaan, menurut Mardikando (2012), adalah strategi yang digunakan untuk mengatasi kebutuhan orang, kelompok, dan komunitas yang lebih besar yang memiliki wewenang untuk memutuskan dan memiliki kendali atas lingkungannya, termasuk sumber daya yang relevan dengan pekerjaan dan aktivitasnya. Karena hampir semua yang dinikmati harus hasil karya sendiri, pemberdayaan masyarakat tidak meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap berbagai program filantropi.

Sementara itu, Mubyarto (1997) mendefinisikan pemberdayaan sebagai tindakan untuk meningkatkan kapasitas suatu kondisi untuk perbaikan. "Capacity building" lebih dapat diterima oleh petenis profesional yang tidak ingin dipengaruhi oleh apapun yang dapat mengakibatkan kesalahan ideologis atau politis karena "empowerment" cenderung mengarah pada tujuan politis sedangkan "capacity building" terlihat lebih netral (non- politik). Keduanya dapat memiliki kata "penguatan" di dalamnya.

Salah satu ide untuk meningkatkan kualitas adalah pemberdayaan, yang dapat diterapkan pada kualitas ekonomi dan sumber daya manusia. Masyarakat nelayan tidak bisa disamakan dengan masyarakat ekonomi di sektor lain, seperti sektor pertanian, sektor industri, dan lain-lain, sebagai masyarakat yang memanfaatkan potensi laut dan pantai laut sebagai pendapatan ekonomi. Untuk meningkatkan kehidupan mereka dan dapat

dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, inisiatif pemberdayaan sangat diperlukan dalam masyarakat pesisir (Nelayan) (As, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok melalui berbagai kegiatan seperti memberikan keterampilan, mengembangkan pengetahuan, memperkuat kemampuan atau potensi yang mendukung terciptanya kemandirian, dan memberdayakan masyarakat. Pengertian pemberdayaan yang dikemukakan oleh para ahli di atas tidak jauh berbeda satu sama lain. komponen ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah.

2.2.4 Macam-Macam Pemberdayaan Masyarakat

Berikut macam-macam bentuk pemberdayaan yang ada di masyarakat, antara lain:

a. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi, sederhananya, berkaitan dengan bagaimana orang menghasilkan uang. Kemampuan untuk mengambil dan melaksanakan keputusan atas pengelolaan dan pengalokasian sumber daya keuangan dikenal dengan pemberdayaan ekonomi (Bayu, 2021)

b. Pemberdayaan Politik

Hal-hal yang kita lakukan untuk mengendalikan diri dan membuat keputusan semuanya terkait dengan pemberdayaan politik. Menurut

kebijaksanaan konvensional, membantu individu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memengaruhi pembuatan kebijakan sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan orang miskin. Mempromosikan keterlibatan politik adalah strategi penting untuk meningkatkan daya tanggap dan akuntabilitas pemerintah sambil juga memberdayakan masyarakat kurang mampu. Hal ini dapat mencakup berbagai strategi, seperti membina kewarganegaraan yang demokratis, membina interaksi antara negara dan masyarakat sipil, membina akses informasi, dan membina asosiasi warga (Porawouw, 2016).

c. Pemberdayaan Budaya

Dalam kehidupan sehari-hari, barang-barang seperti masakan, bahasa, pakaian, kepercayaan spiritual, dan ideologi semuanya terkait dengan pemberdayaan budaya. Mengetahui sejarah Anda dan bangga dengan siapa Anda adalah dua komponen kunci dari pemberdayaan budaya karena, seperti kata pepatah, "Orang yang tidak mengetahui sumber sejarah dan budaya masa lalu seperti pohon tanpa akar."

d. Pemberdayaan Sosial

Segala sesuatu yang dilakukan individu ketika mereka hidup, bekerja, dan bermain bersama terkait dengan pemberdayaan sosial. Dalam arti luas, pemberdayaan sosial dibangun di atas nilai-nilai kerja sosial dan pengembangan masyarakat. (2022, Yunanda).

e. Pemberdayaan Nasional

Suatu bangsa hanya dapat diberdayakan pada tingkat nasional ketika ia memiliki kemampuan untuk memutuskan sendiri. 2022 (Yunanda)

2.2.5 Strategi Pemberdayaan

Strategi organisasi adalah arah yang akan diikuti untuk menjalankan misinya dan mewujudkan visinya. Ilmu dan seni memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk melaksanakan kebijakan tertentu, baik di masa perang maupun damai, digambarkan sebagai strategi oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Strategi secara formal didefinisikan sebagai rencana tindakan yang menguraikan distribusi sumber daya dan tindakan lain untuk bereaksi terhadap lingkungan dan mendukung tujuan organisasi. Pada hakekatnya, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan yang penting. Ada berbagai definisi strategi yang telah diberikan oleh para profesional dalam pekerjaan masing-masing (Mufliana A, 2018).

Meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha memaksimalkannya untuk meningkatkan kemampuan dan kemampuannya dalam memajukan kesejahteraan masyarakat adalah dua contoh inisiatif pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mewujudkan potensi masyarakat dan membantunya menjadi mandiri (Wardana, N. A. 2022).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengubah situasi masyarakat

yang merasa tidak berdaya menjadi masyarakat yang berdaya untuk bergerak ke arah yang lebih baik.

2.2.6 Konsep Strategi Pemberdayaan Nelayan

Pemberdayaan dan kekuasaan terkait erat dalam hal konsepsi. Setiap orang memiliki kapasitas untuk berkembang. Dengan ekstensi, ini membuktikan bahwa tidak ada yang memiliki kekuatan nol. Betapapun tidak berdayanya mereka, manusia tetap memiliki kekuatan dan kekuatan yang, tergantung pada situasi dan pengaturan yang mereka arahkan, dapat hilang atau meningkat kapan saja. Agar kekuatan ini tidak hilang, harus ada upaya untuk mengembangkannya dan memastikannya terus berkembang.

Intinya, pemerintah membuat kampanye pemberdayaan desa nelayan melalui rencana pemberdayaan nelayan. Di Indonesia, desa nelayan dianggap sebagai yang termiskin dari yang miskin, mungkin yang paling miskin mutlak (Saepudin, A. 2019).

Pada umumnya orang yang mencari nafkah dari menangkap ikan di laut disebut nelayan. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Penguatan masyarakat nelayan pada hakekatnya berupaya untuk mencapai kesejahteraan sosial budaya, dan ini merupakan landasan untuk mengembangkan wilayah pesisir agar menjadi kegiatan atau agenda penting bagi pemerintah, dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat pesisir yang dinilai beradab. dalam kondisi buruk dan tertinggal.

Seperti yang dikemukakan Dahuri (2001). Kesejahteraan nelayan masih kalah dibandingkan dengan industri lainnya, khususnya sektor pertanian agraris, di industri perikanan. Di antara semua kelompok masyarakat lainnya, nelayan dapat dikategorikan sebagai strata sosial paling bawah (khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional).

Menurut Kusnadi (2009: 30), yang mendasarkan pendapatnya pada beberapa pandangan di atas, pemberdayaan nelayan dilaksanakan secara sadar, sengaja, metedis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola sumber daya potensial yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk memperkuat kekuatan negosiasi nelayan dalam pembangunan wilayah dan pemanfaatan sumber daya. Agar nelayan lebih mudah mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, Kusnadi (2009:32–33) menyatakan bahwa tujuan utama pemberdayaan adalah memberikan pengaruh kepada mereka dalam berbagai bidang kehidupan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan mengacu pada pemberian lebih banyak sumber daya dan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu untuk mengambil bagian, membuat keputusan, mengambil kendali, dan aktif dalam setiap proses yang berdampak pada kehidupan mereka. Memahami pendekatan pemberdayaan yang tepat sangat penting untuk mencapai pemberdayaan ini karena memastikan keberlanjutan semua inisiatif pemberdayaan di masa depan.

2.2.7 Masyarakat Nelayan

Sekumpulan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir, yaitu masyarakat yang berfungsi sebagai jembatan antara darat dan air, membentuk Masyarakat Nelayan. Komunitas nelayan adalah sistem yang terdiri dari kategori sosial yang menciptakan kohesi sosial. Selain itu, mereka menggunakan simbol budaya dan sistem nilai mereka sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Komunitas nelayan memisahkan diri dari komunitas lain karena karakteristik budaya ini. Sebagian besar masyarakat pesisir bergantung pada pengelolaan sumber daya ikan potensial baik untuk kelangsungan hidup langsung maupun tidak langsung (Saepudin, A. 2019).

2.2.8 Kerangka Berpikir

Dengan mencermati kondisi sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan kelembagaan masyarakat nelayan, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan akan dapat mengimplementasikan kebijakan atau program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. masyarakat setempat, khususnya masyarakat nelayan. Pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kemudahan bagi masyarakat nelayan melalui bantuan fisik yang berkaitan dengan usaha penangkapan ikan seperti kapal, alat tangkap, ikan dan perlengkapannya, serta sarana produksi perikanan, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima,

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan tentunya akan menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Diharapkan arah kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat nelayan dapat mensejahterakan masyarakat nelayan dengan melihat indikator keberhasilan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu menurunkan jumlah masyarakat miskin (nelayan.), menciptakan inisiatif untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kemandirian, dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan.

Analisis peran pemerintah daerah dalam penguatan masyarakat nelayan di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima diuraikan secara singkat di bawah ini.

Peran Pemerintah Daerah Dalam
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di
Desa Sangiang Kecamatan Wera
Kabupaten Bima

1. Arah kebijakan Dinas Perikanan dan Kelautan dalam upaya pemberdayaan Masyarakat Nelayan.
2. Kondisi sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan kelembagaan.
3. Faktor penghambat anggaran dan aturan yang mengikat, pola kebiasaan masyarakat nelayan dan tingkat kesadaran masyarakat nelayan.

Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perikanan
Dan Kelautan Kabupaten Bima

- Pelaksaaan bimbingan untuk peningkatan produksi perikanan dan kelautan.
- Pemanfaatan prasarana kelautan dan perikanan secara optimal.
- Pembinaan dan pengembangan sarana prasarana penangkapan.
- Pelaksanaan teknologi penangkapan ikan laut dan air tawar.
- Penginventarisasian, pembinaan dan pengembangan sarana prasarana perikanan dan kelautan
- Perencanaan, pelaksanaan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan sumber daya kelautan.
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan data potensidan produksi perikanan tangkap, sumberdaya kelautan.
- Pelaksanaan, pelayanan pemberian perizinan di bidang perikanan tangkap.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2009), penelitian kualitatif adalah suatu jenis penyelidikan yang menghasilkan data deskriptif dari subjek dan pelaku yang dapat diamati dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan.

Metodologi penelitian ini yang menghindari penggunaan alat ukur, menganut prinsip penelitian kualitatif. Data atau informasi tersebut dijelaskan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat sesuai dengan keadaan situasinya. Dari orang-orang dan perilaku yang diamati, pendekatan ini menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata maupun ekspresi tertulis atau vokal.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian di Desa Sangiang dan Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Bima. Waktu pelaksanaan penelitian skripsi bulan Oktober 2022.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang digunakan untuk memberikan rincian tentang konteks dan keadaan sekitar penelitian. Selain itu, informan adalah orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang masalah penelitian. Purposive sampling, dimana penelitian dilakukan dengan kriteria

yang telah ditetapkan dan diputuskan berdasarkan tujuan penelitian digunakan untuk memilih informan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, informan akan dijadikan sebagai subjek penelitian. Berikut adalah subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Bima.
2. Kepala Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima.
3. Ketua Karang Taruna Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima.
4. Anggota Karang Taruna Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima.
5. Masyarakat Nelayan Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

3.4 Sumber Data

Sumber data menjadi pertimbangan krusial karena akan mempengaruhi kualitas temuan penelitian. Sumber data primer dan sekunder termasuk dalam sumber informasi.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang berasal dari sumber data primer, atau sumber pertama di lapangan, dan sumber data ini merupakan tempat pertama dihasilkannya data. Secara khusus, data dari Kecamatan Wera, Kepala Desa Sangiang, perangkat desa, masyarakat nelayan terdekat, dan sumber data lainnya yang peneliti butuhkan untuk mempermudah dalam menemukan data yang mereka butuhkan.

2. Data Sekunder

Istilah "data sekunder" mengacu pada sumber data yang melengkapi, mengklarifikasi, dan menawarkan interpretasi dari sumber data asli. Dalam

hal ini, data sekunder dikumpulkan dari publikasi kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat nelayan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pengumpulan informasi oleh peneliti dengan bantuan instrumen atau teknologi. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data merupakan komponen alat pengumpul data yang menilai berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Peneliti akan menggunakan sejumlah strategi untuk mengumpulkan data, termasuk yang berikut:

1. Observasi

Proses pengamatan yang sistematis dan terstandar adalah upaya untuk mengumpulkan data. Artinya dengan melakukan observasi secara teratur dan mendokumentasikan kejadian, data dapat dikumpulkan dari objek penelitian pada saat subjek sadar. Dalam penelitian ini, observasi dikumpulkan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pemerintah memberdayakan masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dimana pewawancara (pengumpul data) mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung dan mencatat atau merekam tanggapan responden dalam kaset. Tentu saja, diperlukan imajinasi pewawancara; bahkan hasil wawancara yang dilakukan menurut pedoman jenis ini lebih bergantung pada pewawancara.

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan dalam penelitian ini sebagai metode pengumpulan data ketika informasi yang dikumpulkan diketahui sebelumnya. Selain itu, instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis dan jawaban alternatif telah dibangun untuk pengumpulan data.

3. Dokumentasi

Perolehan data dan informasi berupa buku, arsip, catatan, angka tertulis, dan gambar berupa laporan dan informasi yang dapat mendukung penelitian disebut dokumentasi. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, yang kemudian diperiksa. Arsip tentang masyarakat nelayan Desa Sangiang dan bahan-bahan lain yang membantu pengumpulan data menjadi salah satu dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Analisi Data

Dengan menerapkan analisis kualitatif, peneliti melakukan analisis data. Dengan tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan pemerintah daerah (Dinas Perikanan dan Kelautan) dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima, dan bagaimana hubungan antara pemerintah daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan) dengan masyarakat di , peneliti menggunakan teknik analisis yang berguna sebagai alat untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan responden. Langkah-langkah dalam analisis data:

1. Redaksi Data

Informasi yang dikumpulkan selama proyek penelitian (juga dikenal sebagai data lapangan) disajikan dalam deskripsi atau laporan yang menyeluruh dan mendalam. Dalam penelitian ini, reduksi data berupaya memilih data yang dianggap penting, meringkas dan memusatkan pada hal-hal yang dianggap penting, dan menghapus yang tidak penting. Proses reduksi data untuk investigasi ini berlangsung terus menerus..

2. Penyajian Data

Pengorganisasian data memerlukan penggabungan (pengelompokan) data yang satu dengan data yang lain sehingga semua data yang dipelajari benar-benar tergabung dalam satu kesatuan. Ini dikenal sebagai penyajian data.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Dalam penelitian kualitatif, verifikasi data juga dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian, baik sebelum maupun sesudah pengumpulan data.

3.7 Keabsahan Data

Standar validitas data yang diperoleh menentukan validitas data. Beberapa syarat harus dipenuhi untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Enam kriteria berikut digunakan untuk menentukan apakah data itu valid:

1. Keterpercayaan (*Credibility*)

Ukuran keakuratan data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kesesuaian konsep peneliti dengan temuan penelitian, adalah kepercayaan atau kredibilitas. Kemampuan peneliti untuk membuat fokus, memilih dan menggunakan informan, menerapkan teknik pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasikan data, dan melaporkan temuan studi yang semuanya harus konsisten satu sama lain adalah yang diperiksa keakuratannya.

2. Kecakupan Referensial

Untuk menganalisis dan memahami data penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai bahan, catatan, atau catatan yang dapat digunakan sebagai referensi dan standar pengujian.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah strategi untuk mengevaluasi dan membandingkan data yang ada yang bertujuan untuk bertemu pada titik tengah informasi data yang diperoleh.

a. Triangulasi Sumber

Dengan membandingkan data dari banyak sumber, triangulasi sumber dapat menentukan apakah data tersebut dapat dipercaya. Setelah itu, data dicirikan dan dikategorikan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut.

b. Triagulasi Teknik

memverifikasi keakuratan data dengan membandingkannya dengan sumber yang sama menggunakan berbagai metode, seperti melakukan observasi, melakukan wawancara, dan menyusun dokumentasi. Jika diperoleh hasil yang berbeda, peneliti melakukan verifikasi terhadap sumber data untuk memperoleh data yang diyakini akurat..

c. Tringulasi Waktu

Keandalan data seringkali juga dipengaruhi oleh waktu. Oleh karena itu, tanggal atau keadaan yang berbeda digunakan untuk melakukan pemeriksaan kredibilitas data. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan dua kali untuk menemukan fakta yang lebih dapat dipercaya.

4. Keteralihan (*transferability*)

Pengujian untuk transferabilitas data berfokus pada seberapa luas temuan penelitian ini dapat digunakan atau diterapkan. Peneliti mencari dan mengumpulkan informasi kejadian empiris dalam konteks yang sama—khususnya pihak-pihak yang terkait langsung dengan inisiatif untuk mendukung keberhasilan kinerja Anggota Dewan—agar dapat dilakukan transferability.

5. Kebergantungan (*dependability*)

Ke Dalam penelitian non-kualitatif, kehandalan berfungsi sebagai stand-in untuk kehandalan. Validitas adalah prasyarat untuk reliabilitas.

Uji ketergantungan dilakukan dalam penelitian kualitatif dengan meninjau keseluruhan prosedur penelitian. Seringkali peneliti dapat menyajikan data tetapi tidak sepenuhnya menganalisis seluruh prosedur penelitian di lapangan. Keandalan peneliti ini perlu diperiksa dan ditentukan apakah temuan penelitian ini akurat atau tidak. Akibatnya, supervisor dan peneliti membahasnya. Dalam studi ini, pengawas melakukan uji ketergantungan untuk mengaudit semua kegiatan terkait penelitian peneliti.

6. Kepastian (*confirmability*)

Menguji keakuratan data (konfirmasiabilitas) memerlukan perbandingan temuan penelitian dengan metode saat ini untuk melihat apakah metode tersebut masih memberikan hasil yang diinginkan. Gelar ini dapat diperoleh dengan hati-hati mengaudit setiap komponen, serta proses dan temuan penelitian.

Jika dibandingkan dengan metode lain untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini, triangulasi akan sangat memperkuat keabsahan data. Metode triangulasi diterapkan oleh peneliti dalam penelitian ini. Teknik triangulasi seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk membandingkan data dari sumber yang sama dengan menggunakan metode yang beragam untuk menilai kebenarannya. Jika ketiga metode untuk mengevaluasi keandalan data menghasilkan hasil yang bertentangan, penelitian akan melakukan wawancara tambahan dengan sumber data terkait dan lainnya untuk menentukan data mana yang diyakini akurat.